



Buletin Parlementaria

Nomor 1141/III/III/2021 • Maret 2021



Perempuan Penentu Masa Depan Bangsa



9 772614 339005



BULETIN



5 Komisi III Terima Kunjungan Kehormatan Dubes Uni Eropa



17 BKSAP DPR Ajak Masyarakat Turut Andil dalam Diplomasi Parlemen

Perempuan Penentu Masa Depan Bangsa



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat membuka pameran foto yang digelar oleh Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia di selasar Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Foto: Jaka/Man

Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani membuka pameran foto di selasar Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (8/3). Pameran yang digelar oleh Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia tersebut berlangsung hingga 18 Maret mendatang.

Dalam sambutannya, Puan menyampaikan bahwa foto yang ditampilkan dalam pameran memuat cerita beserta peran dan kinerja perempuan-perempuan anggota MPR, DPR, dan DPD RI saat foto itu diabadikan. Para perempuan anggota parlemen masing-

menyerahkan tiga foto untuk dipamerkan dalam acara tersebut.

"Kegiatan ini dilakukan secara gotong-royong. Selamat Hari Perempuan Internasional, kita perempuan hebat, perempuan tangguh, yang ikut menentukan majunya bangsa ini ke depan," ungkap politisi PDI-Perjuangan itu dalam pidato pembukaan pameran foto tersebut.

Puan menjelaskan, dirinya memberikan tiga foto untuk dipamerkan. Salah satunya, foto saat bertemu dan menemani seorang anak memberi makan ikan di halaman Islamic Center, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Foto itu diambil saat Puan sedang

kunjungan kerja ke Lampung, beberapa waktu yang lalu.

Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI ini bercerita, di lokasi tersebut dia bertemu dengan seorang anak yang sedang duduk sendiri, menunggu temannya untuk salat Jumat bersama. Puan kemudian mengajak anak bernama Hari tersebut untuk memberi makan ikan bersama di tempat itu.

"Saat saya mau jalan ke kolam ikan, ada anak kecil duduk sendiri, saya dekati, saya tanya, sambil kasih makan ikan yang banyak banget. "Itu cerita di balik foto, saya ketemu sekitar 30 menit sebelum salat Jumat. *Eggak diskenarioin*, alami. Bahagia itu sederhana, buat saya juga suatu kebahagiaan," sambung legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Puan juga menjelaskan foto yang dipamerkan dalam acara ini merepresentasikan bahwa perempuan adalah sosok yang mampu mengambil keputusan penting. "Pameran foto-foto ini menunjukkan bahwa perempuan-perempuan ini mampu, kita bisa bersama bapak-bapak mengambil keputusan penting di parlemen," ujar Puan lebih lanjut.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin, serta Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Diah Pitaloka turut mendampingi Puan dalam pameran foto yang juga diramaikan dengan *talkshow* itu.

■ mh/hal/sf



DPR Harap Perempuan Indonesia Kampanyekan Perang Lawan Kekerasan Gender



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Naupal, Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, Ertangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamat, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydus

FOTOGRAFER

Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno P.D. Moempoeni, Azka Restu Afidhillah, Geraldji Opie, Hasri Mentari

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Annanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpri.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO

DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender. “Ini termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman, paksaan, dan penghapusan kemerdekaan,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.

Bahkan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama organisasi perempuan lainnya, telah meluncurkan panduan perlindungan hak perempuan dari diskriminasi dan KBG dalam situasi pandemi.

Di sisi lain, Azis menyatakan peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2021 merupakan momentum bahwa perempuan Indonesia harus berani menghadapi tantangan serta rasa takut dalam menggapai cita-cita.

“Perempuan tidak hanya berada di belakang layar karena memiliki energi, pengaruh dalam kemajuan sebuah bangsa,” ujar politisi dapil Lampung II itu.

Azis menyebut pesan nasihat dari orang tua bahwa perbuatan besar diawali dari langkah pertama. Meskipun berupa langkah kecil, tapi Azis meyakini hal itu menjadi penentu bahwa semua sudah bergerak. “Perempuan Indonesia harus berani menggapai cita-cita. *Choose to challenge*,” tegas Azis.

Menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan itu, hidup di masa modern dan demokratis, membuat kesempatan perempuan terbuka luas. Tiada ada lagi kekhawatiran, keraguan, hingga ketakutan yang dulu kerap mendominasi. Pemerintah pun melindungi setiap hak warga negara. ■ rdn/es

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. Foto: Andri/Man

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin berharap para perempuan Indonesia mampu mengampanyekan perang melawan Kekerasan Berbasis Gender (KBG).

“Kerja dan gerak bersama dari berbagai pihak dan berbagai lapisan untuk melakukan penanganan dan membangun rujukan adalah harapan. Pelibatan laki-laki dalam pembangunan kesejahteraan perempuan untuk akhiri kekerasan berbasis gender juga penting untuk dikedepankan,” kata Azis dalam keterangan persnya kepada *Parlementaria*, Senin (8/3).

Diketahui, beberapa waktu terakhir KBG menjadi persoalan utama yang menimpa perempuan di tengah pandemi Covid-19. KBG diartikan sebagai

Komisi I Komitmen Lindungi Data Pribadi Masyarakat

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi komitmen untuk melindungi data pribadi seluruh warga negara Indonesia. Komitmen itu dibuktikan dengan telah dibahasnya 194 dari total 317 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari 15 Bab dan 72 Pasal dalam RUU tersebut.

“Komisi I ingin betul bahwa data pribadi seluruh masyarakat Indonesia harus dilindungi semaksimal mungkin. Ada banyak hal tentunya ke depan pembahasannya juga alot,” jelas Abdul Kharis saat menjadi narasumber dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang mengangkat tema ‘Politik Hukum Terhadap Pelindungan Data Pribadi’.

FGD yang dilaksanakan di Aula FH UI, Depok, Jawa Barat, Rabu (3/3) ini terselenggara atas kerja sama Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Turut dihadiri Kepala BK Setjen DPR RI Inosentius Samsul, Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi UI Yudho Giri Suchyo dan Dosen Fakultas Hukum (FH UI).

Diketahui, RUU PDP merupakan usulan dari pemerintah kepada DPR yang dituangkan melalui Surat Presiden Nomor R-05/Pres/01/2020 tanggal 24 Januari 2020. Presiden Joko Widodo dalam surat tersebut menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia untuk bersama Komisi I DPR RI membahas terkait RUU PDP tersebut.

Ketua Panja RUU PDP ini menjelaskan, DIM yang belum selesai dibahas yaitu menyangkut DIM Usulan Perubahan Substansial. DIM Substansial ini berkaitan pula dengan DIM yang lain sehingga jika sudah selesai dibahas, maka DIM lainnya akan lebih mudah disepakati.

“Ketika kita membahas subjek data, ternyata kaitannya banyak sekali. Kaitannya dengan kewajiban subjek, dan seterusnya. Kalau ada hak juga ada kewajiban di sisi yang lain semua yang berkaitan dengan subjek data dibahas panjang lebar dan sampai 20 Januari 2021, terakhir belum bisa disepakati DIM yang berkaitan dengan subjek data,” ujar Politisi PKS ini.

Selain terkait Hak dan Kewajiban Subjek Data beserta ruang lingkungannya, isu-isu

krusial RUU PDP lainnya yaitu terkait pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, transfer data pribadi, dan badan/lembaga penyelenggara pelindungan data pribadi.

Dalam kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Edmon Karim menilai pelindungan data pribadi dalam ekonomi digital harus diperkuat, seiring dengan Indonesia menuju industri 4.0 dan *society* 5.0.

“Adalah kurang tepat bahwa masyarakat beranggapan Indonesia memiliki kekosongan hukum terkait perlindungan data pribadi, regulasinya memang ada saat ini melalui PP No. 71/2019 dan PP No. 80/2019. Tetapi, penguatan melalui pembuatan RUU PDP tentunya baik bagi masyarakat karena dapat mengharmonisasi ketentuan sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya. ■ rdn/es

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. Foto: Oji/Man



Komisi III Terima Kunjungan Kehormatan Dubes Uni Eropa



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Picket. Foto: Jaka/Man

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menerima kunjungan silaturahmi Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Picket, dalam bentuk Kunjungan Kehormatan atau *courtesy call* di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3).

Beberapa isu yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut, diantaranya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), revisi UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dan revisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Dia (Vincent Picket, **red**) hanya

silaturahmi dan tanya isu-isu populer. Kemudian saya sampaikan adalah UU KUHP, UU Pemasarakatan, dan UU ITE. Itu saja tidak ada yang lain dan masalah juga menjadi fokus bahasan berkaitan dengan narkoba,” jelas Sahroni.

”

POLITISI PARTAI NASDEM INI MENEGASKAN, HUKUMAN MATI YANG DIBAHAS DALAM RUU KUHP TIDAK SERTA MERTA DIJATUHKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA.

Dalam pertemuan tersebut, politisi Partai NasDem ini menegaskan hukuman mati yang dibahas dalam RUU KUHP tidak serta merta dijatuhkan dalam tindak pidana narkoba.

“Tidak semua (dikenakan hukuman mati, **red**), hanya beberapa yang memang bandar besar tertangkap itu pasti dihukum mati. Tapi kalau yang hanya pemakai sifatnya hanya rehabilitasi,” terangnya.

Karena itu, Sahroni menyambut baik adanya kunjungan ini dan memastikan akan melakukan kunjungan balik pascapandemi Covid-19. “Dan saya akan *visit* ke kantornya terkait dengan masalah hukum di Indonesia. Agar pandangan dari negara dia dan kita dengan prinsip yang sama,” ujar Sahroni menutup pernyataannya. ■ rdn/es

KPK Perlu Tingkatkan Kapasitas Penyidik Untuk Mengusut Kejahatan Finansial



Anggota Komisi III DPR RI Ary Egahni Ben Bahat berdialog dengan Ketua KPK Firlil Bahuri. Foto: Jaka/Man

Anggota Komisi III DPR RI Ary Egahni Ben Bahat mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bidang penindakan tindak pidana korupsi. Selain itu, ia berharap lembaga antirasuah tersebut dapat meningkatkan kapasitas penyidikannya untuk memahami kejahatan finansial (financial crimes) yang marak terjadi saat ini.

“Sebagaimana yang diketahui, DPR sudah mengesahkan Undang-Undang tentang *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* antara Indonesia-Swiss. Dalam konteks ini sebaiknya KPK meningkatkan kapasitas penyidikannya dalam memahami kejahatan finansial dan audit forensik,” ujar Ary dalam

”

SEBAIKNYA KPK MENINGKATKAN KAPASITAS PENYIDIKNYA DALAM MEMAHAMI KEJAHATAN FINANSIAL DAN AUDIT FORENSIK

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Pimpinan KPK dan Ketua Dewan Pengawas KPK di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3).

Diharapkan KPK dapat memahami

kejahatan keuangan yang mungkin perlu pelacakan rekening-rekening di bank-bank Swiss. Selain itu, secara khusus politisi Fraksi Partai NasDem itu turut mengapresiasi upaya KPK dalam membentuk program pembelajaran antikorupsi sejak dini di institusi pendidikan anak-anak.

Di sisi lain, Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding menyoroti terkait kasus korupsi atau suap perpajakan yang terjadi akhir-akhir ini. “Kasus ini menarik untuk ditelusuri, sebab banyak keluhan dari masyarakat soal ini. Kalau mau serius mengatasi penerimaan pajak, sebab setiap tahun sering tidak tercapai targetnya,” ujar politisi PAN tersebut saat rapat berlangsung.

Ia mendorong agar KPK dapat mengusut dan menyelidiki oknum-oknum yang terlibat dalam kasus itu. Sebab penggelapan pajak akan merugikan penerimaan negara. Sarifuddin mengusulkan agar KPK juga dapat menelisik praktik *transfer pricing* yang diduga digunakan untuk menghindari pembayaran pajak.

Politisi dapil Sulawesi Tengah itu juga mendorong agar KPK turut andil dalam menangani skandal Asabri dan Jiwasraya. Sebab kedua kasus tersebut mendapatkan perhatian lebih dari publik dan diharapkan KPK dapat melakukan supervisi terhadap pengusutannya.

Secara umum, Komisi III DPR RI mendukung pimpinan KPK untuk meningkatkan capaian kinerja dan efektifitas programnya di berbagai sektor. Serta menggalakkan sosialisasi dan pengenalan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat. ■ ah/es

Adang Daradjatun Apresiasi Kinerja KPK Tahun 2020



Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun salam kepal dengan Ketua KPK Firlil Bahuri. Foto: Jaka/Man

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas laporan keuangannya yang berhasil mencapai angka 100 persen pada tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Artinya, KPK selama ini telah mempergunakan anggarannya dengan baik,” jelas Adang di sela-sela rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Pimpinan KPK dan Ketua Dewan Pengawas KPK

di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3).

Selain itu, politisi Fraksi PKS ini juga mendukung langkah-langkah KPK yang saat ini lebih mengedepankan unsur pencegahan dan bersifat komprehensif. Sehingga, pendidikan dalam rangka pencegahan korupsi bekerja sama dengan kementerian/ lembaga dan masyarakat luas menjadi sangat diutamakan.

“Setelah diberikan pendidikan masih juga terjadi korupsi, terjadilah tindakan terhadap yang berkaitan

dengan penyidikan atas korupsi tersebut,” ujar Wakapolri periode 2004-2006 ini.

Selain mendapatkan capaian 100 persen atas laporan keuangan tahun 2020, pada rapat tersebut diketahui capaian KPK pada Indeks Perilaku Antikorupsi tahun 2020 sebesar 96 persen, Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 120 persen, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK sebesar 99,56 persen, dan Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran KPK sebesar 96,24 persen. ■ rdn/es

Pemerintah Impor 1 Juta Ton Beras, Legislator Pertanyakan Program *Food Estate*

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mempertanyakan program *Food Estate* yang telah digembar-gemborkan pemerintah. Hal ini menyusul rencana pemerintah yang akan mengimpor 1 juta ton beras pada tahun ini. Slamet meminta pemerintah terbuka soal perkembangan *Food Estate*.

“Pemerintah harus bertanggung jawab dan transparan atas program *Food Estate*. Sampaikan kepada publik tingkat keberhasilan dari program (*Food Estate*) ini,” kata Slamet, dalam keterangan persnya yang diterima *Parlementaria*, Minggu (7/3).

Pasalnya, rencana impor 1 juta ton beras dinilai kontradiktif dengan wacana Menteri Pertahanan yang menyebut *Food Estate*

menggunakan sistem pertanian presisi, sehingga bisa menghasilkan 3 hingga 4 kali lebih banyak (sekira 17 ton per hektar) produk ketimbang dengan penggunaan teknologi biasa.

Seperti dikabarkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa menjaga ketersediaan beras di dalam negeri merupakan hal penting untuk dilakukan agar harga komoditas tersebut bisa tetap terkendali. Sehingga ia berencana melakukan

impor beras sebanyak 1 juta ton di tahun 2021.

“Pemerintah sudah memulai proyek *Food Estate* seluas 165 ribu hektar di berbagai lokasi. Artinya pemerintah

”

JANGAN SAMPAI ANGGARAN DAN PUPUK YANG SUDAH TERBATAS DIALIHKAN DARI PETANI KE *FOOD ESTATE*, TETAPI TIDAK MENAMBAH PRODUKSI PANEN NASIONAL,

bisa memberi tambahan hasil panen di luar hasil panen petani biasanya, dengan hitungan, 165 ribu hektar dikali 17 ton, maka seharusnya ada 2,8 juta ton tahun ini. Lalu untuk apa lagi impor 1 juta ton?” tanya Slamet.

Legislator asal Sukabumi ini menjelaskan, proyek *Food Estate* telah menyerap anggaran Kementerian Pertanian, termasuk pupuk yang sebelumnya dialokasikan bagi petani. “Jangan sampai anggaran dan pupuk yang sudah terbatas dialihkan dari petani ke *Food Estate*, tetapi tidak menambah produksi panen nasional,” tegas Slamet.

Politisi PKS itu juga mengungkapkan, kebijakan impor yang dibuka lebar melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan peluang besar bagi lapangan kerja petani luar negeri dan mempersempit peluang pemasaran produk petani dalam negeri. “Kami mengingatkan agar pemerintah tidak mudah menerapkan impor demi memberi optimisme kepada petani Indonesia,” pungkasnya. ■ dep/sf



Anggota Komisi IV DPR RI Slamet.
Foto: Arief/Man



Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat memimpin RDPU Komisi V DPR RI dengan pengurus LPJK. Foto: Arief/Man

Komisi V Ingatkan LPJK Untuk Tingkatkan Pengawasan Kualitas Infrastruktur

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengingatkan kepada segenap kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 2021-2024 yang baru dilantik oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk semakin meningkatkan fungsi pengawasan kualitas infrastruktur secara signifikan. Secara khusus, dengan meningkatkan pengawasan dari hulu ke hilir yang dimulai dengan tahap perencanaan yang berkualitas.

Hal tersebut disampaikan Lasarus saat memimpin rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi V DPR RI dengan pengurus LPJK, di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3). Rapat yang digelar secara fisik dan virtual tersebut membahas rencana program

dan kegiatan LPJK tahun 2021 dan proyeksi sampai dengan tahun 2024.

“Tentu, Komisi V DPR RI berkeyakinan, segenap pengurus yang ada dalam struktur kepengurusan LPJK sangat berkompeten. Sehingga, harus segera bekerja secara nyata di seluruh dunia usaha jasa konstruksi dengan memperhatikan aspek hulu hingga ke hilir yang diawali dari tahap perencanaan. Mengingat, seluruh pekerjaan yang berkualitas diawali dari tahap perencanaan secara baik dan matang,” ujar Lasarus.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menekankan, permasalahan yang kerap terjadi dalam pembangunan konstruksi jalan tol merupakan ruang yang harus segera diperbaiki. Mengingat, jalan tol memiliki batasan usia pakai, sehingga wajib diantisipasi berbagai kerusakan

dengan memprioritaskan perencanaan dan analisis yang mendalam sejak awal pembangunan infrastrukturnya.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana Putra. Ia meminta LPJK fokus pada kualitas jalan tol yang dibangun. Kurun waktu tiga tahun terakhir, terjadi tujuh kecelakaan besar di jalan tol. Untuk itu, ia mengusulkan perlu adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang dinilai tidak melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengerjaan kualitas jalan tol.

“Jalan yang dipakai berapa bulan hancur. Sebagai contoh (jalan tol, **red**) Lampung-Palembang baru sebulan diresmikan, (kini, **red**) hancur rusak. Buruknya pembangunan jalan tol akan berdampak pada kerugian masyarakat dan pemerintah,” tandas politisi Fraksi Partai Gerindra itu. ■ pun/es



Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan. Foto: Andri/Man

Nasim Khan Dorong Skema Kemitraan dalam Industri Rumah Tangga

“Moreover, ini salah satu upaya lanjutan yang dapat membesarkan UMKM ke tingkat selanjutnya. Sebab, terkadang untuk masuk ke ritel atau supermarket besar, UMKM itu sudah diperlakukan layaknya industri besar dengan biaya yang tinggi. Jadi kalau tidak dengan cara seperti ini, UMKM tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan besar,” terang politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Untuk diketahui, pada Pasal 6 Perpres Nomor 10 Tahun 2021, diatur ketentuan bahwa dalam bidang usaha persyaratan tertentu, investasi dapat dilakukan oleh semua investor yang memenuhi persyaratan penanaman modal untuk PMDN tak hanya koperasi dan UMKM. Kemudian, Dalam lampiran III Perpres tersebut, tertuang bahwa bidang usaha industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya masuk daftar bidang usaha persyaratan tertentu, dengan syarat penanaman modal dalam negeri (PMDN) 100 persen.

Sementara itu, dalam aturan Perpres yang lama Nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya hanya dikhususkan untuk pelaku usaha UMKM. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam lampiran II Nomor 84 dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 10794 dengan persyaratan ‘Dicadangkan Untuk UMKMK’. ■ er

Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan meminta pemerintah segera mencabut aturan yang mengizinkan industri besar bisa masuk di sektor industri rumah tangga seperti industri rempeyek, keripik dan sejenisnya. Apabila pemerintah *keukeuh*, setidaknya pengusaha besar diberikan syarat untuk melakukan kemitraan dengan para pelaku UMKM yang sudah terlebih dahulu bermain di usaha tersebut.

“Apabila pemerintah mengizinkan perusahaan besar masuk ke bisnis rumah tangga, syaratnya, misalnya dengan mengajak kerja sama industri-industri kecil yang selama ini sudah berkecimpung di dunia produksi kerupuk, keripik, ukiran, dan sejenisnya. Dengan adanya skema itu, maka diharapkan akan meningkatkan investasi di bidang tersebut,” katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/3).

Selama ini, lanjut Nasim, ia sering mendengar keluhan para pelaku

”

UMKM ITU SUDAH DIPERLAKUKAN LAYAKNYA INDUSTRI BESAR DENGAN BIAYA YANG TINGGI. JADI KALAU TIDAK DENGAN CARA SEPERTI INI, UMKM TIDAK AKAN MAMPU BERSAING DENGAN PERUSAHAAN BESAR

UMKM kerupuk, keripik, rempeyek dan sejenisnya yang mengalami kendala pemasaran ke retail-retail besar. Dengan kerja sama antara industri besar dengan pelaku UMKM, diharapkan para pengusaha besar bisa membantu mencari jalan keluar kesulitan para pelaku UMKM seperti memasarkan produknya ke supermarket-supermarket besar.

Komisi VIII Serahkan Bantuan Mushaf Al-Qur'an kepada DKM Masjid Baiturrahman



Penyerahan bantuan Mushaf Al-Qur'an, Juz Amma, dan buku Yasin dari Komisi VIII DPR RI kepada DKM Masjid Baiturrahman DPR/MPR/DPD RI. Foto: Runi/Man

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto didampingi Pimpinan Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik, Marwan Dasopang, dan Diah Pitaloka serta Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Kamaruddin Amin menyerahkan 400 buah Kitab Suci Al-Qur'an, 200 Juz Amma, dan 200 buku Yasin yang merupakan bantuan dari Kemenag RI kepada Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Baiturrahman yang diwakili oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar.

Dalam sambutannya di Masjid Baiturrahman, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/3), Yandri menyatakan bahwa Komisi VIII menyambut baik adanya kegiatan

penyerahan bantuan Mushaf Al-Qur'an, Juz Amma, dan Yasin tersebut.

"Kebutuhan akan Mushaf Al-Qur'an di Masjid Baiturrahman ini akhirnya terpenuhi. Yang diwujudkan ini ternyata lebih banyak dari yang diinginkan. Saya sebagai Ketua Komisi VIII mewakili seluruh Anggota Komisi VIII dan Anggota DPR secara umum, mengucapkan terima kasih kepada Menteri Agama RI. Dengan diserahkannya 400 buah Al-Qur'an, 200 Juz Amma, dan 200 buku Yasin ini diharapkan bisa melengkapi dinamika kegiatan keagamaan di Kompleks DPR ini," ucap Yandri.

Yandri mengaku yakin bahwa dengan bertambahnya materi Mushaf Al-Qur'an ini maka akan semakin

banyak orang yang betah berada di Masjid Baiturrahman. "Artinya, manfaat atau keberadaan Mushaf Al-Qur'an ini dapat memberikan keberkahan bagi bangsa dan negara kita," imbuhnya.

Yandri berpesan kepada ketua DKM Masjid Baiturrahman agar kiranya sumbangan Mushaf Al-Qur'an itu bisa dipelihara dengan baik kondisinya dan diatur dengan sebaik-baiknya agar keberadaan Mushaf Al-Qur'an, Juz Amma, dan buku Yasin tersebut dapat dirasakan manfaatnya.

"Saya yakin dengan adanya bantuan dari Kementerian Agama Agama ini menjadi bukti bahwa Kementerian Agama selalu peduli dengan keinginan masyarakat," pungkas politisi PAN itu. ■ dep/es

Pemerintah Diminta Pastikan EUA Vaksin AstraZeneca Sesuai Prosedur

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan *emergency use authorization* (EUA) untuk vaksin AstraZeneca yang dikembangkan oleh Oxford University. Vaksin yang tidak dilakukan uji klinis di Indonesia ini, menurut BPOM, memiliki hasil efikasi 62 persen. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar memastikan proses penetapan EUA atas vaksin AstraZeneca berjalan sesuai prosedur.

“Sebagai wakil rakyat, saya perlu mendapat kepastian bahwa izin darurat penggunaan vaksin oleh pemerintah telah melewati prosedur standar. Meskipun AstraZeneca diperoleh dengan skema COVAX WHO secara gratis, bukan berarti kita tidak perlu mempertimbangkan efikasi, kualitas dan kehalalannya. Semua harus transparan, jangan ada yang disembunyikan,” ujar Netty dalam berita tertulisnya kepada **Parlementaria**, Rabu (10/2).

Pasalnya, izin EUA untuk vaksin Sinovac dikeluarkan BPOM setelah ada uji klinis tahap ke tiga di Indonesia. “Apakah hal yang sama tidak perlu dilakukan untuk AstraZeneca? Pemerintah perlu menjelaskan hal ini agar tidak menimbulkan keraguan masyarakat awam. Jika tidak ada uji klinis, dari mana diperoleh tingkat efikasi 62 persen?” katanya.

Demi melindungi rakyat dari pandemi, pada dasarnya Netty mengapresiasi keputusan cepat pemerintah untuk menggunakan jenis vaksin AstraZeneca dan

mendatangkannya ke Tanah Air, asalkan prosesnya transparan dan tidak ada kepentingan bisnis dan politis menungganginya.

“Kita sedang perang melawan Covid-19 yang taruhannya adalah nyawa rakyat dan keselamatan bangsa. Keputusan memilih, membeli dan mendatangkan vaksin adalah kewenangan pemerintah yang tidak boleh dititipi kepentingan bisnis dan politis. Kita perlu tahu apakah ada konsekuensi yang harus ditanggung negara akibat menerima skema COVAX WHO. Selain itu, harus dipastikan keluarnya UEA vaksin AstraZeneca dapat mempercepat proses vaksinasi nasional yang saat ini berjalan lambat,” ujar politisi Fraksi PKS ini.

Netty menilai, realisasi vaksinasi nasional saat ini masih rendah yakni hanya 200 ribu perhari, padahal target pemerintah adalah 1 juta dosis per hari. Oleh karena itu, ia berharap dengan keluarnya izin atas vaksin AstraZeneca, target vaksinasi dapat tercapai.

Kepada pemerintah, Netty menyarankan agar lebih kreatif dalam melaksanakan proses vaksinasi, misalnya dengan strategi jemput bola. “Proses vaksinasi jangan hanya dilakukan di fasyankes yang telah ditetapkan. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal jauh dari fasyankes tersebut? Lakukan lebih kreatif, jangan hanya menunggu. Pemerintah bisa juga melakukan vaksin massal di berbagai tempat yang bisa langsung menjangkau sasaran penerima vaksin,” tambahnya.

Bagi Netty, ketepatan dan kecepatan vaksin penting dilakukan untuk



Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Foto: Jaka/Man

membentuk *herd immunity*. “Tujuan penting proses vaksinasi adalah untuk membentuk *herd immunity*. Jadi kalau proses vaksinasinya lambat dan akhirnya tidak mencapai *herd immunity*, apa gunanya program vaksinasi? Jangan hanya cepat memutuskan membeli dan mendatangkan vaksin, tapi masih sengarut manajemen pelaksanaannya di lapangan,” urai Netty.

Terakhir, Netty meminta agar pemerintah menyosialisasikan vaksinasi secara massif dan efektif, agar informasi-informasi yang tidak benar seputar vaksin dan vaksinasi tidak terulang kembali. “Sosialisasi vaksin juga jangan monoton. Gandeng tokoh masyarakat dan *influencer* yang sikap dan ucapannya didengar dan diikuti. Hati-hati, jangan salah pilih *role model* yang malah memberikan contoh buruk pada masyarakat,” tutup legislator daerah pemilihan Jawa Barat VIII itu. ■ rnm/es

Panja GTK Urai Persoalan Guru Honorer



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti saat memimpin rapat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Foto: Eno/Man

Komisi X DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara). Panja ini ditujukan untuk mengurai sengkabut guru honorer di berbagai daerah. Jumlah guru honorer terus melimpah jumlahnya, tapi hingga kini belum juga diangkat menjadi ASN.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengemukakan, masalah GTK adalah masalah nyata di dunia pendidikan Indonesia. Rekrutmen GTK juga tidak satu pintu. Semua Pemda bisa merekrut, bahkan sekolah pun bisa merekrut sendiri berdasarkan kebutuhannya. “Hal ini menyebabkan jumlah guru honorer menjadi cukup banyak, baik yang direkrut pemerintah daerah (provinsi dan

kab/kota), bahkan direkrut oleh sekolah itu sendiri,” katanya saat memimpin rapat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (9/3).

Dikatakan Agustina, sebaran dan kualitas guru honorer tidak merata di semua daerah maupun di semua tingkatan pendidikan. Ini selalu menjadi persoalan klasik. Padahal, pendidikan bermutu salah satunya berawal dari GTK. Pendidikan bermutu, lanjutnya, merupakan modal menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta menjadi salah satu bentuk investasi yang akan menentukan masa depan bangsa.

“Di sisi lain, Kemendikbud belum memiliki peta kebutuhan dan sebaran guru terutama guru PNS yang berdasarkan kebutuhan per provinsi dan kabupaten/kota, per jenjang

pendidikan, per jalur pendidikan, dan per mata pelajaran. Kebutuhan guru baru ini juga terjadi karena prediksi adanya guru PNS yang memasuki masa pensiun,” papar legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IV ini.

Ditambahkan politisi PDI Perjuangan ini, upaya memperbaiki GTK honorer masih terkendala dengan persoalan klasik, seperti tumpang tindih peraturan, tata kelola pendidikan antara pusat dan daerah, pengelolaan anggaran pendidikan, serta pendidikan yang belum ramah untuk kaum disabilitas.

“Berdasarkan deskripsi itu, Komisi X perlu melakukan pengawasan dengan membentuk Panja Peningkatan GTK Honorer Menjadi ASN untuk memastikan tersedianya guru dan tenaga kependidikan yang merata,” ungkap Agustina. ■ mh/sf



Menkeu Harus Turun Tangan Atasi Dugaan Suap di Ditjen Pajak

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Foto: Arief/Man

untuk penanganan pandemi Covid-19, namun ada oknum di Ditjen Pajak yang menyalahgunakan wewenangannya untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompok,” sesal Ketua Kelompok Fraksi Gerindra di Komisi XI DPR ini.

Perlu diketahui, lanjut Hergun, APBN 2020 dan APBN 2021 dipatok defisit Rp1.000 triliun merupakan perbandingan antara penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto. “Dalam sepuluh tahun terakhir rasio pajak mengalami penurunan. Pada 2010 masih di level 12,9 persen. Namun, pada 2018 turun menjadi 11,4 persen. Tahun 2019 turun kembali menjadi 10,73 persen. Sementara pada 2020 diproyeksikan hanya 7,9 persen dan di 2021 sebesar 8,18 persen,” papar Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.

Menurut mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR ini, perlu ada reformasi birokrasi di Kemenkeu. Dan reformasi birokrasi itu harus dibarengi dengan pertanggungjawaban pimpinannya untuk menekan tindakan koruptif. Jika seorang pegawai melakukan korupsi, pimpinannya harus dicopot.

“Ingat, ini bukan kasus baru. Dugaan suap di Kemenkeu ini menunjukkan bahwa kementerian tersebut harus meningkatkan lagi pengawasan terhadap para pegawainya. Sudah seharusnya Kemenkeu mengatur kembali manajemen antisuap para pegawai serta meningkatkan kembali komitmen para petugas pajak serta pemeriksaan LHKPN pegawai Ditjen Pajak,” seru Hergun. ■ mh/es

KPK tengah mengusut dugaan kasus suap puluhan miliar di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kasus suap tersebut diduga melibatkan pejabat di Ditjen Pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati harus turun tangan.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan (Hergun) mengungkapkan hal ini dalam keterangan persnya, Rabu (3/3). Mengutip pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, penyidik KPK sedang memproses kasus ini dengan mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangkanya. Modusnya kata Hergun, pengurusan pajak sebuah perusahaan

agar pajak perusahaan yang dimaksud bernilai rendah.

Ditambahkan Hergun, KPK telah melakukan pengeledahan dan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu untuk memeriksa perusahaan yang diduga menyuap pemeriksa pajak. Legislator daerah pemilihan Jawa Barat IV itu menyerukan agar Menkeu Sri Mulyani membersihkan Ditjen Pajak dari oknum yang memanipulasi pajak.

“Proses hukum tetap dilakukan oleh KPK. Namun, Menteri Keuangan memiliki tanggung jawab menempatkan birokrasi yang bersih di Ditjen Pajak. Ini sungguh ironis. Negara sedang kekurangan dana

Baleg Bersama Pemerintah Cabut RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021



Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI, perwakilan DPD RI dan Menkumham menandatangani daftar Prolegnas Prioritas 2021. Foto: Runi/Man

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyempurnakan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 dalam Rapat Kerja bersama DPD dan perwakilan pemerintah, yakni Kementerian Hukum dan HAM. Rapat ini menyetujui untuk mengeluarkan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dari Prolegnas Prioritas tahun ini.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Atgas mengatakan, Rapat Kerja ini diagendakan sebagai amanat dari keputusan Rapat Bamus yang masih menunda penetapan Prolegnas RUU Prioritas 2021. "Mengingat perkembangan dan perubahan arah politik legislasi yang terjadi khususnya yang terkait dengan keberadaan RUU tentang Pemilihan Umum dalam Prolegnas RUU prioritas," ujarnya

dalam rapat di Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Selasa (9/3).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan, berdasarkan kesepakatan fraksi-fraksi serta sesuai dengan surat dari pimpinan Komisi II selaku pengusul RUU, maka DPR RI melalui Baleg akan menarik dan mengeluarkan revisi UU Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas tahun ini.

Dalam Rapat tersebut disepakati RUU tentang Pemilu dikeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas dan digantikan dengan RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang diusulkan oleh Pemerintah. Sehingga total rancangan regulasi yang masuk dalam Prolegnas tetap berjumlah 33 RUU.

Di samping itu sesuai dengan aspirasi

dan keinginan pengusul RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) yang semula diusulkan Anggota DPR RI menjadi diusulkan oleh Baleg. Lebih lanjut legislator dapil Sulawesi Tengah itu menyebutkan penyusunan dan pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 ini telah disetujui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Selain itu Fraksi-Fraksi di DPR RI turut menyuarakan pandangannya terkait perubahan Prolegnas Tahun 2021.

Yang mana ada beberapa catatan seperti Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS yang tidak menyetujui keluarnya revisi UU Pemilu dari Prolegnas. Sementara Fraksi Partai Golkar mengusulkan untuk menambah satu Rancangan Undang-Undang (RUU) yakni RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) agar dapat masuk ke dalam Prolegnas. ■ ah/sf

BKSAP DPR Ajak Masyarakat Turut Andil dalam Diplomasi Parlemen

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan Parlemen Indonesia memiliki sistem diplomasi yang tertuang dalam undang-undang. Ia berharap, diplomasi yang dilakukan DPR RI dapat saling berkaitan dengan diplomasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri. Untuk itu, DPR RI sangat membutuhkan masukan dan aspirasi dari masyarakat luas.

Hal itu diungkapkan Fadli usai acara BKSAP Day yang menyosialisasikan peran diplomasi parlemen dengan tema “Diplomasi Parlemen Sebagai Bagian dari Diplomasi Total Indonesia,” di Kantor Wali Kota Tangerang Selatan, Selasa (9/3). Acara ini turut dihadiri Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany beserta jajaran, juga sivitas akademika Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Pamulang, Universitas Pelita Harapan, dan Swiss German University.

“Kita berharap, diplomasi parlemen menjadi komplementer dari diplomasi yang dilakukan oleh Kemenlu, kita ingin menyambungkan itu. Oleh karena itu perlu menyerap aspirasi dari masyarakat, baik dari perguruan tinggi, dari pemerintah daerah tentang hal-hal yang kita perlu sampaikan dan kita kerjasamakan. Misalnya dengan luar negeri. Di BKSAP ada *desk international regional* dan *bilateral* dan ini perlu dimanfaatkan untuk kepentingan nasional kita, kepentingan,” kata Fadli.

Fadli menambahkan, diplomasi di bidang pendidikan juga sudah berjalan cukup lama. Ia mencontohkan, kerja sama antar perguruan tinggi sudah



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon bertukar cinderamata dengan Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany. Foto: Nadia/Man

dilakukan, bahkan kini menjadi salah satu prasyarat bagi sebuah akreditasi.

“Sekarang kita sudah *border less*, semua kebijakan banyak yang berkaitan kebijakan internasional. Misalnya urusan pandemi, kita pasti terkait dengan WHO juga berkaitan dengan vaksin yang diproduksi negara lain. Semuanya semakin ada interdependensi dan saling ketergantungan. Di sinilah kita memerlukan diplomasi,” ungkap politisi Partai Gerindra itu.

Sementara itu, Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany mengajak masyarakat untuk dapat menyuarakan aspirasinya ke BKSAP DPR RI yang memiliki tupoksi diplomasi politik

luar negeri yang sejalan dengan kepentingan nasional. BKSAP terus melakukan sosialisasi untuk menyampaikan aspirasi dan menyerap informasi yang tentu nantinya akan menjadi kebijakan politik luar negeri.

“Karena, secara tupoksi bisa langsung komunikasinya dengan parlemen-parlemen luar negeri untuk menyuarakan. Beberapa *success story* yang tadi disampaikan tentu sangat membanggakan bagi kita, mudah-mudahan terus bisa menjadi penyambung komunikasi kepentingan nasional dengan kepentingan internasional itu dampaknya juga akan untuk masyarakat lagi,” tutupnya. ■ ndy/es

DPR Dukung Penuh Upaya Pemberantasan Korupsi



Foto bersama Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera usai FGD di Bogor, Jawa Barat. Foto: Alfi/Man

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menekankan bahwa parlemen mendukung sepenuhnya segala bentuk upaya pemberantasan korupsi. Sebagai *Anti-Corruption Agency* (ACA) di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun bekerjasama secara erat bersama parlemen. Mengingat keduanya adalah dua sayap, maka tidak bisa KPK bekerja sendiri dengan menegasikan parlemen, atau parlemen bekerja dengan mengkerdikan KPK.

“DPR *men-support* sepenuhnya aktivitas antikorupsi. Dalam pertemuan hari ini, Anggota DPR yang hadir semua menunjukkan komitmennya terkait kesamaan frekuensi (untuk pemberantasan korupsi),” kata Mardani usai mengikuti FGD yang digelar BKSAP DPR dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD) bertajuk ‘Berkaca pada Interaksi antara Parlemen dan Lembaga Anti-Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi’ di Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/3).

Adapun pekerjaan rumah selanjutnya, terkait bagaimana membuat lembaga antikorupsi tetap transparan dan akuntabel. Politisi Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) itu menilai, saat ini KPK sudah menjadi *best practice* atau menjadi salah satu rujukan dunia, sebagaimana terjadi dalam periode tahun 2012 hingga 2014. Sejumlah negara seperti Brazil dan Malaysia bahkan menjadikan KPK sebagai salah satu referensi dalam membangun dan mengembangkan lembaga antikorupsi di negaranya masing-masing.

Anggota BKSAP DPR RI Johan Budi menyampaikan pengalamannya sebagai mantan Plt Pimpinan KPK (2015) dan mantan Juru Bicara Istana (2016-2019). Menurut politisi PDI-Perjuangan tersebut, posisinya saat ini sebagai Anggota Komisi III DPR RI memiliki sejumlah prioritas desain hukum ke depan.

“Komisi III saat ini tengah menyusun *roadmap* legislasi dengan fokus pada RUU KUHP, RUU KUHP, RUU PAS dan RUU Kelembagaan. Salah satu upaya mengenai revisi KUHP memiliki tujuan untuk perbaikan pidana materiil di bidang korupsi untuk mengisi *gap* UNCAC. RUU Tipikor juga didorong untuk bisa menerapkan hal-hal seperti *illicit enrichment*, penyuaipan di organisasi dan pejabat asing, korupsi di sektor swasta, korupsi di

sektor swasta, gratifikasi, perdagangan pengaruh dan lainnya,” papar Johan.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memaparkan, KPK secara konstitusional sesuai UU Nomor 19 Tahun 2019 bertugas untuk melakukan tindakan pencegahan, koordinasi dengan instansi berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) dan instansi pelayanan publik. Selain itu, KPK juga memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara, juga melakukan supervisi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tipikor, serta melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Strategi saat ini adalah pendidikan yakni agar orang tidak ingin korupsi, pencegahan supaya orang tidak bisa korupsi, dan penegakan hukum dengan sasaran orang takut untuk korupsi. KPK mengharapkan DPR berperan dalam pemberantasan korupsi, termasuk mengatur kelembagaan, tugas dan wewenang lembaga pemberantasan korupsi, mengatur definisi dan sanksi tipikor dalam hukum pidana dengan memperhatikan keselarasan dengan UNCAC,” kata Ghufron. ■ alw/sf

DPR Harapkan Kerja Sama dengan Unpad Bangun Kolaborasi bagi Kemajuan Bangsa

Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Universitas Padjajaran (Unpad) dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPR RI melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Dukungan Keahlian dalam Pembentukan Undang-Undang dan Kerja Sama antara BK dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpad tentang dukungan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.

Penandatanganan Naskah Nota Kesepahaman antara BK dengan Unpad dan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama antara BK dengan Fisip Unpad dilaksanakan di Gedung E Program Pasca Sarjana Fisip Unpad di Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/3).

Penandatanganan naskah MoU dan naskah kerja sama, dari Setjen DPR RI ditandatangani Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul. Sementara dari Unpad diwakili Dekan Fisip Unpad Widya Setiabudi Sumadinata dan Ketua Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Politik Mudiyyati Rahmatunnisa.

Sekjen DPR Indra Iskandar dalam sambutannya menyatakan, untuk memenuhi kebutuhan DPR RI dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Dewan, diperlukan

kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi untuk memperkuat dukungan teknis keahlian DPR RI. Dan melalui penandatanganan MoU dan kerja sama dengan Unpad diharapkan dapat membangun kolaborasi yang intensif demi kemajuan bangsa dan negara.

“Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Badan Keahlian dengan Universitas Padjajaran dan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Keahlian Dewan dengan Fisip Unpad diharapkan dapat membangun kolaborasi yang lebih intensif bagi kita semua khususnya universitas padjajaran dalam berbagai

hal untuk kemajuan bangsa dan negara,” papar Indra.

Sementara itu, Dekan Fisip Unpad Widya Setiabudi Sumadinata menyatakan kerja sama ini menjadi momen yang baik bagi BK dalam meningkatkan kerja sama dalam berbagai bentuk selanjutnya dengan Unpad.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada DPR RI, khususnya Sekretariat Jenderal dalam penandatanganan kerja sama dengan Universitas Padjajaran. Mudah-mudahan kerja sama yang ditandatangani ini menjadi momen yang baik dalam meningkatkan kerja sama dalam berbagai bentuk selanjutnya,” harap Widya.

Selain penandatanganan naskah MoU dan kerja sama, pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan seminar *online* kerja sama BK dengan Unpad yang mengangkat tema ‘Quo Vadis RUU Pemilu’. Bertindak sebagai *keynote speaker*, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dengan pembicara antara lain Ketua Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Politik Unpad Mudiyyati Rahmatunnisa, Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, dan Peneliti Utama Bidang Politik Dalam Negeri Pusat Penelitian BK DPR RI Prayudi. ■ sc/sf



Foto bersama Sekjen DPR RI, Kepala Badan Keahlian DPR RI dan perwakilan Fisip Unpad di sela-sela penandatanganan naskah MoU dan naskah kerja sama BK DPR RI dengan Unpad. Foto: Sucliat/invl

Ittama DPR Dukung Penyusunan Anggaran Berkualitas, Berintegritas, dan Kolaboratif

Inspektur Utama (Ittama) Sekretariat Jenderal DPR RI Setyanta Nugraha mendukung penyusunan anggaran DPR RI pada tahun 2022 yang berkualitas, berintegritas, dan kolaboratif. Indikator berkualitas itu yakni secara formal adalah capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPKD, tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang berujung pada kerugian negara, juga kinerja yang diukur dari angka-angka dalam konteks reformasi birokrasi.

Hal itu disampaikan Totok, sapaan akrab Setyanta di sela-sela Rapat Kerja Anggaran dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun (RKAT) 2022 Setjen DPR RI di Jakarta Selatan, Sabtu (6/3). “Jadi rapat kerja penyusunan anggaran untuk 2022 itu adalah merupakan rapat kerja dalam rangka untuk mencapai tujuan agar bagaimana anggaran itu nanti akan menghasilkan anggaran yang berkualitas,” jelas Totok.

Selain berkualitas, penyusunan RKAT 2022 Setjen DPR RI harus sesuai dengan kaidah anggaran yang berintegritas. Yaitu, harus memenuhi kaidah-kaidah efektif, efisien, ekonomis, dan *compliance* (pemenuhan) atau taat pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, anggaran berintegritas juga harus memenuhi asas atau kaidah aspek keadilan dan kepatutan.

“Oleh karena itu perlu ketika saya menyampaikan adalah lebih menekankan pada bagaimana menyusun anggaran berintegritas.



Foto bersama Sekretaris Jenderal DPR RI bersama jajaran Badan Keahlian DPR RI dan Inspekturat Utama DPR RI dalam Rapat Kerja Anggaran dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022. Foto: Andri/Man

Intinya integritas itu dapat dipertanggungjawabkan dari aspek *output*, *outcome*, dan juga dalam aspek pengelolaan keuangan negaranya,” jelas Totok lebih lanjut.

Di sisi lain, penyusunan anggaran DPR RI pada tahun 2022 juga perlu memenuhi hal yang diharapkan yaitu kolaborasi. Menurut Totok, rapat kerja tersebut harus bisa menciptakan kolaborasi dalam rangka penyusunan anggaran, sehingga dapat saling melengkapi dan tidak tumpang tindih.

Untuk menunjang hal tersebut, Totok memastikan Ittama Setjen DPR RI telah melakukan pergeseran paradigma dalam pengawasan. Sehingga,

menempatkan pihak yang diawasi sebagai seorang klien dan hubungan yang bersifat lebih konstruktif.

“Kalau dulu pengawas itu kan indikatornya adalah semakin banyak temuan semakin baik. Tapi sekarang kita geser, bukan temuannya. Tapi, seberapa banyak inspektorat itu memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola menuju *good governance*. Kalau dulu juga inspektorat hanya *post audit*, mengaudit setelah selesai kegiatan. Tapi, kita juga bisa melakukan sekarang ini *pra audit* pada saat kegiatan jalan. Itu beberapa paradigma yang sudah kita ubah,” tutup Totok. ■ rdn/sf

Realokasi Program PEN untuk UMKM Harus Transparan

Munculnya pandemi Covid-19 setahun yang lalu berdampak negatif terhadap UMKM. UMKM yang dikenal tangguh dalam menghadapi krisis moneter 1998 dan krisis finansial global 2008 akhirnya pun menjadi tidak berdaya akibat pandemi ini. Berdasarkan studi Bappenas (2020) dengan melakukan sampling 2.535 UMKM dari berbagai wilayah Indonesia, pandemi Covid-19 ini menurunkan pendapatan UMKM sebesar 40-80 persen.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Helmizar saat memberikan sambutan dalam diskusi dengan perwakilan BPKP Pusat, INDEF, BPKP Provinsi Jawa Barat dan peneliti BK Setjen DPR RI, di Cianjur, Jawa Barat, Selasa (9/3).

“Pemerintah telah merespons kondisi tersebut dengan menetapkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Adapun alokasi dana program PEN untuk UMKM di tahun 2020 sebesar Rp123,46 triliun,” ungkap Helmi.

Lebih lanjut, Helmi menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) per 25 Januari 2021, pagu awal program pemulihan UMKM TA 2020 adalah Rp123,75 triliun kemudian pagu direvisi menjadi Rp116,31 triliun (Outlook Kemenkeu Per 17 Desember 2020) dengan nilai realisasi mencapai Rp110,75 triliun (95,22 persen).

“Besarnya anggaran PEN tersebut tentunya harus direalisasikan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi terutama di tengah situasi yang sulit akibat pandemi Covid-19.



Foto bersama Kepala PKAKN BK DPR RI Helmizar usai diskusi dengan perwakilan BPKP Pusat, INDEF, BPKP Provinsi Jawa Barat dan peneliti BK Setjen DPR RI. Foto: Singgih/Man

Perkembangan pada tahun 2021, Pemerintah mengalokasikan anggaran PEN untuk mendukung UMKM dan pembiayaan korporasi sebesar Rp156,06 triliun,” ungkapnya.

“Untuk itulah, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR, memandang perlu melakukan konfirmasi dan pendalaman mengenai permasalahan dalam pengelolaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi UMKM di masa pandemi Covid-19, sebagai masukan dalam rangka penyusunan kajian terkait akuntabilitas PEN bagi UMKM,” ujar Helmi.

“Terdapat 3 kebijakan dalam PEN yang dikaji sisi akuntabilitasnya oleh

PKAKN yaitu Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Dana Insentif Daerah Tambahan TA 2020, dan Stimulus Modal Kerja yang bersumber dari *refocussing* APBD,” imbuh Helmi.

BPUM merupakan stimulus yang pendanaannya bersumber dari APBN pemerintah pusat TA 2020 dengan total anggaran Rp28,8 triliun dan dibagikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro yang belum pernah mendapat pembiayaan perbankan senilai Rp2,4 juta (satu kali), sedangkan untuk DID Tambahan TA 2020 merupakan bagian dari Transfer ke Daerah dengan alokasi Rp5 triliun yang ditujukan khusus untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di daerah. ■ skr/sf

Parlemen Perempuan Sampaikan Pentingnya Kesetaraan Gender dalam Teknologi



Anggota Komisi I DPR RI Irine Yusiana Roba Putri saat menjadi pembicara dalam *talkshow* "Kiprah Perempuan dalam Pengembangan Industri TIK Nasional" yang digelar Kaukus Perempuan Parlemen RI. Foto: Arief/Man

Anggota Komisi I DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menekankan bahwa kesetaraan gender dan perjuangan melawan diskriminatif dapat membantu negara menjadi kuat. Hal ini dikarenakan kesetaraan gender dapat meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya perempuan yang memiliki populasi terbanyak di dalam pembangunan.

"Dari perspektif negara, dengan mempromosikan kesetaraan gender, kita otomatis juga melibatkan perempuan untuk terlibat lebih banyak," ujar Irine saat menjadi pembicara dalam *talkshow* bertema 'Kiprah Perempuan dalam Pengembangan Industri TIK Nasional' yang digelar Kaukus Perempuan Parlemen di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Selasa (9/3).

Lebih lanjut, menurut legislator dapil Maluku Utara itu, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat membuka peluang kesempatan yang luar biasa terhadap pemberdayaan perempuan. Menurutnya, dengan melakukan pemberdayaan perempuan akan otomatis membawa pembangunan ke arah yang lebih baik untuk sebuah negara. "Riset mengatakan kalau memang (peran) perempuannya kuat, negara juga akan kuat," ungkapnya.

Di sisi lain, Irene menyayangkan masih adanya kesenjangan yang besar dalam akses TIK antara perempuan dengan laki-laki atau biasa disebut dengan *Gender Digital Divide*, bahwa perempuan mengakses TIK lebih rendah dari pada laki-laki di semua negara. Padahal kesenjangan ini dapat

menghambat kesetaraan gender yang selama ini diperjuangkan.

"Akses terhadap internet itu, perempuan datanya masih kurang dari 40 persen dari populasi perempuan. Sementara laki-laki itu sudah lebih dari 43 persen," kata politisi PDI-Perjuangan ini. Untuk itu, menurutnya, literasi digital merupakan sebuah langkah yang penting dan diperlukan masyarakat Indonesia saat ini jika memang mau maju dan tidak tertinggal di bidang TIK.

Senada, Anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri Nahlia juga mengungkapkan bahwa kesenjangan TIK masih banyak dirasakan utamanya antara masyarakat di ibukota dengan pendidikan tinggi dan sudah terbiasa dengan gadget dalam kesehariannya dengan masyarakat di daerah yang masih kurang familiar dengan teknologi.

"Kita harus mengerti bahwa teman-teman milenial di daerah itu harus dirangkul, mereka juga harus mengerti teknologi khususnya kalau kita pengen maju, kita pengen perempuan bisa berdaya memajukan ekonomi Indonesia," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Untuk itu, menurut politisi daerah pemilihan Jawa Barat IX itu, literasi digital perlu bagi perempuan agar dapat memaksimalkan penggunaan internet dengan lebih baik lagi. Sehingga tidak hanya menjadi pengguna pasif melainkan lebih aktif dalam memanfaatkan teknologi dengan memaksimalkan *start-up* untuk pemasaran produk UMKM. ■ *bia/sf*

Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, Kaukus Perempuan Parlemen

Republik Indonesia mengadakan pameran foto dan rangkaian *talkshow* bertajuk “Kiprah Perempuan Parlemen: Jalan Harapan Bangsa.” Pameran foto dan rangkaian *talkshow* dengan beragam topik terkini itu digelar pada tanggal 8-18 Maret 2021 di Selasar Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan.

Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Diah Pitaloka mengungkapkan, perjuangan perempuan untuk dapat duduk di kursi parlemen dan terlibat langsung dalam pembuatan keputusan tidaklah mudah. Sebab, mereka masih harus berjuang menghadapi stigma, dan kendala struktural maupun kultural sebagai perempuan. Selain itu, kiprah mereka juga diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik terhadap perlindungan dan kesejahteraan kaum perempuan di berbagai bidang kehidupan.

“Perempuan dengan segala dinamikanya menghadapi tantangan tersendiri ketika akan terjun ke dunia politik. Hal ini penting untuk diapresiasi untuk terus memberikan semangat dan dukungan kepada perempuan agar terus terlibat aktif dalam pembangunan bangsa melalui politik,” ungkap Diah usai pembukaan pameran foto di loby Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (8/3).

Diah menilai pameran foto dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day) itu sebagai bentuk apresiasi kepada perempuan parlemen Indonesia yang telah turut serta mewarnai pengambilan kebijakan di Tanah Air. Ia berharap acara tersebut bisa menjadi penyemangat setiap perempuan di Tanah Air untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan Indonesia di berbagai bidang, termasuk politik.

Dalam pameran foto yang dibuka oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani itu, Diah menjelaskan

Kaukus Perempuan Parlemen Peringati Hari Perempuan Dunia



Pembukaan pameran foto yang diadakan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia di selasar Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan. Foto: Jaka/nvl

bahwa foto-foto tersebut sekaligus menunjukkan sisi manusiawi para anggota legislatif perempuan. Mereka tidak hanya tampil serius, tetapi juga sederhana, dan apa adanya, layaknya manusia dengan berbagai dinamikanya. Sebanyak 124 Anggota DPR perempuan, dan 42 Anggota DPD perempuan yang turut dalam pameran akan menampilkan masing-masing tiga fotonya.

Bahkan, Puan turut serta sebagai peserta pameran foto dengan memajang tiga foto pribadi pilihannya saat bertugas, untuk ditampilkan di hadapan publik.

Dilanjutkan Diah, sebagai salah satu elemen masyarakat, perempuan adalah faktor penting untuk menuju Indonesia Maju 2045. Sejumlah isu krusial di

negeri ini sangat erat dan dekat dengan kehidupan perempuan. Isu lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, pemberdayaan komunitas, pembangunan desa, hingga teknologi informasi, adalah sebagian kecil dari isu-isu penting di mana perempuan terlibat aktif dan partisipatif.

Tidak hanya itu, politisi PDI-Perjuangan itu menilai Perempuan parlemen merupakan kelompok kepentingan yang berkiprah dan terjun langsung dalam isu-isu penting tersebut. Oleh karenanya, dalam ajang pameran foto perempuan parlemen ini, publik akan dapat menyaksikan beragam wajah perempuan yang berkuat dengan bermacam-macam upayanya di parlemen maupun keseharian. ■ ayu/es

Komisi VII Pastikan Proses Peralihan Blok Rokan Berjalan Lancar

Panitia Kerja (Panja) Migas Komisi VII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin menyoal PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Provinsi Riau, guna memastikan bahwa proses peralihan pengelolaan ladang minyak Blok Rokan dari Chevron ke PT Pertamina dapat berjalan dengan lancar.

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik tersebut, Komisi VII DPR RI menerima dan menampung berbagai aspirasi dari para tokoh lembaga adat dan masyarakat Riau. Alex menyampaikan, banyak hal yang harus disiapkan dalam proses peralihan Blok Rokan ini.

“Untuk itu, Komisi VII hadir di Provinsi Riau guna mengakomodir masukan dan keinginan dari semua pihak yang terkait. Semoga ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Untuk daerah kita utamakan, untuk nasional kita prioritaskan,” tegas Alex di Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (9/3).

Legislator Partai Golkar itu memaparkan, Blok Rokan merupakan blok minyak terbesar di Indonesia dengan luas 6.264 kilometer persegi yang terletak di 5 Kabupaten di Riau, yaitu Bengkalis, Siak, Kampar, Rokan Hulu dan Rokan Hilir. “Rata-rata produksi Blok Rokan dalam produksi nasional adalah sebesar 46 persen sejak tahun 1951 hingga tahun 2020,” terangnya.

Disebutkannya, Blok Rokan memiliki 115 lapangan dengan tiga lapangan memiliki potensi minyak yang baik, yaitu Duri, Minas dan Bekasap. Potensi Lapangan Duri pertama kali ditemukan



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Panja Migas Komisi VII DPR RI ke PT CPI, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Foto: Dep/Man

pada tahun 1941 dan dimana produksi pertamanya terjadi pada tahun 1951 di bawah pengelolaan Caltex yang kemudian berlanjut di bawah PT Chevron Pacific Indonesia hingga 2021.

“Proses pengelolaan Blok Rokan sudah disepekat. Pengelolaan Blok Rokan akan resmi beralih dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada tanggal 9 Agustus 2021,” jelas legislator dapil Sumsel II itu.

Alex mengatakan, selama masa transisi perlu dilakukan komunikasi intensif berbagai pemangku kepentingan, khususnya kepada pihak PT Pertamina Hulu Rokan dan PT CPI, agar proses transisi seperti peralihan kontrak kerja mitra, aset, formula dan teknologi, transfer data, tenaga kerja, SOP dan lainnya dapat berjalan lancar.

“Sehingga bisa menjaga produksi di Blok Rokan dan menahan natural *decline rate* atau penurunan alamiah dengan melakukan pemboran sesuai target,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar mengharapkan peralihan pengelolaan ladang minyak Blok Rokan dari CPI ke Pertamina tidak menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Ia berharap, Pertamina membuka peluang bagi masyarakat Riau apabila perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk meneruskan produksi Blok Rokan.

“Pemrov Riau dan seluruh masyarakat Riau mendukung nasionalisasi Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina apabila bisa memberi manfaat yang lebih besar bagi daerah penghasil,” ujar Syamsuar. ■ dep/sf



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (8/3/2021). Foto: Tim Fotografer/Man



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat penetapan Anggota DPR RI Anis Byarwati sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI di Ruang Rapat BAKN DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (8/3/2021). Foto: Mentari/Man



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam M. Azis Syamsuddin menetapkan Anggota DPR RI Sihar Sitorus menjadi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/3/2021). Foto : Arief/Man